



**PENETAPAN**  
**Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **Abd. Samad;**  
Tempat lahir : Parang;  
Umur atau tanggal lahir : 59 tahun / 8 Maret 1963;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Parang, Desa Bontomalling,  
Kec. Pasimasunggu, Kabupaten  
Kepulauan Selayar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam Register Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Slr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon Atas Nama ABD. SAMAD dengan NIK. 730110080360001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20-04-2012;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301100312080002 atas nama kepala keluarga ABD. SAMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20-10-2017;
3. Bahwa Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran pemohon No. 7301-LT-01102015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21-12-2020;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil No. 882.4/015/III/2021/BKPSDM tanggal 15 Maret 2021;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data Kependudukan pada Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dimiliki oleh pemohon yang semula tertulis ABD. SAMAD, lahir di Parang pada tanggal 08-03-1963 menjadi tertulis ABDUL SAMAD, lahir di Parang pada tanggal 08-03-1963;

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah ingin mengubah data kependudukan pada Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dimiliki oleh pemohon yang semula tertulis ABD. SAMAD, lahir di Parang pada tanggal 08-03-1963 menjadi tertulis ABDUL SAMAD, lahir di Parang pada tanggal 08-03-1963 adalah ingin menyesuaikan data kependudukan yang dimiliki oleh pemohon;

7. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan pada Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dimiliki oleh pemohon yang semula tertulis ABD. SAMAD, lahir di Parang pada tanggal 08-03-1963 menjadi tertulis ABDUL SAMAD, lahir di Parang pada tanggal 08-03-1963
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama ABD. SAMAD dengan NIK. 730110080360001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20-04-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor: 7301100312080002 atas nama kepala keluarga ABD. SAMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20-10-2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran pemohon No. 7301-LT-01102015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21-12-2020 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat Keputusan Bupati Kab. Kep. Selayar tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil No. 882.4/015/III/2021/BKPSDM tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa dokumen fotokopi yang masing-masing telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran tercatat atas nama Abd Samad diperbaiki menjadi Abdul Samad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4:

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan para saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon, Pemohon bernama Abd Samad;
2. Bahwa berdasarkan dokumen Pendidikan dan SK pensiunan pemohon, Pemohon bernama tertulis Abdul Samad;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan pemohon, sehingga demi tertibnya administrasi serta kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran, yang semula bernama Abd Samad diperbaiki menjadi Abdul Samad beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon juga memohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Terknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak disebutkan bahwa dalam hal perubahan data dalam Kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas *contarius actus* yaitu konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa pejabat tata negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan perubahan Nama Pemohon pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri sehingga terhadap permohonan tersebut patut untuk tidak dapat diterima, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan dalam negeri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7301-LT-01102015 yang semula tertulis Abd Samad menjadi Abdul Samad;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh ST. Muflihah Rahmah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Adi Anto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adi Anto, S.H.

ST Muflihah Rahmah, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Slr